

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kota Bekasi merupakan salah satu bagian dari Megapolitan Jabodetabek dan memiliki jumlah penduduk terbanyak keempat di Indonesia yaitu 2,530,676,00 (sumber: BPS Kota Bekasi 2023). Pada saat ini Kota Bekasi menjadi kota yang berkembang dan menjadi tempat tinggal kaum urban , sehingga berdampak meningkatnya jumlah penduduk di Kota Bekasi, seperti yang disampaikan oleh Soebyakto & Saputra (2015), “tingginya pertumbuhan penduduk di kota biasanya terjadi karena dua hal, yang pertama terjadi pertumbuhan penduduk secara alami dan kedua terjadi karena adanya arus urbanisasi akibat tingginya jumlah migrasi.

Dampak meningkatnya jumlah penduduk juga mempengaruhi kebutuhan tempat tinggal di Kota Bekasi, namun ketersediaan lahan kosong di Kota Bekasi semakin berkurang, tidak semua penduduk kondisi ekonominya baik, karena tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga untuk dapat berteduh dan memiliki tempat tinggal mereka membangun rumah tidak permanen pada lokasi dan menyebabkan munculnya kawasan permukiman (w.w.w.RadarBekasi.id 03 Agustus 2021).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan Kawasan Permukiman, yang dimaksud permukiman kumuh ialah permukiman yang tidak layak huni ditandai ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat. Indonesia merupakan negara berkembang yang juga memiliki permasalahan permukiman kumuh. Adanya kecenderungan peningkatan luas permukiman kumuh pun ikut menjadi isu kebijakan tata ruang yang strategis di Indonesia. Di kawasan perkotaan, telah terjadi kecenderungan peningkatan laju pertumbuhan penduduk sehingga memicu potensi bertambahnya jumlah penduduk sebesar 32% yang bertempat tinggal di kawasan permukiman kumuh (Budi Prayitno, 2014).

Kota Bekasi merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Barat yang memiliki permukiman kumuh. Munculnya permukiman kumuh di Kota Bekasi tidak terlepas

dari perkembangan kota yang semakin pesat. Jumlah penduduk yang meningkat lebih banyak disumbang dari Urbanisasi. Pada angka kelahiran, berawal dari angka urbanisasi yang tinggi tersebut kemudian membawa dampak bagi penurunan kualitas lingkungan permukiman menjadi lebih padat dan cenderung kumuh. Kurangnya Pemerataan Pembangunan distribusi sumber daya dapat menyebabkan kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Akibatnya, penduduk yang tinggal di pedesaan yang mencari pekerjaan dan peluang hidup yang lebih baik di kota cenderung mendirikan permukiman kumuh karena mereka tidak memiliki akses ke fasilitas dan layanan yang layak.

Permukiman kumuh merupakan kondisi permukiman tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakaturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi serta kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat . Keadaan lingkungan dengan kualitas buruk dan tidak sehat, tempat perlindungan bagi kegiatan marjinal serta sumber penyakit epidemik yang akhirnya akan menular ke wilayah perkotaan. Menurut *CSU's Urban Studies Department*, kawasan kumuh merupakan suatu wilayah yang memiliki kondisi lingkungan yang buruk, kotor, penduduk yang padat serta keterbatasan ruang (untuk ventilasi cahaya, udara, sanitasi, dan lapangan terbuka) (Hariyanto, 2007).

Adanya permukiman kumuh di Kota Bekasi dapat memberikan dampak negatif yang cukup besar terhadap kota tersebut, salah satu dampak negatif dari permukiman kumuh di kota Bekasi yaitu adanya peningkatan angka kemiskinan , banyak warga yang tinggal di permukiman kumuh merupakan orang yang kurang mampu secara ekonomi, kondisi ekonomi yang buruk dapat menyebabkan kemiskinan yang semakin meluas di kota Bekasi.

Adanya angka Kriminalitas tinggi, Permukiman kumuh seringkali menjadi tempat yang rawan terjadinya kejahatan Kondisi ekonomi yang buruk dan kepadatan penduduk yang tinggi dapat memicu terjadinya tindak kriminal di kota Bekasi. Permukiman kumuh yang seringkali dibangun di daerah yang rawan bencana alam seperti banjir dan longsor, dapat meningkatkan risiko terjadinya bencana alam di kota Bekasi.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 mengamatkan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman yaitu peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru, dan penghidupan yang berkelanjutan. Permukiman kumuh masih menjadi tantangan bagi pemerintah kabupaten/kota, karena selain merupakan masalah, di sisi lain juga ternyata merupakan salah satu pilar penyangga perekonomian kota. Mengingat sifat pekerjaan dan skala pencapaiannya yang sangat kompleks, diperlukan kolaborasi beberapa pihak antara pemerintah mulai tingkat pusat sampai dengan tingkat kelurahan/desa, pihak swasta, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

Program kotaku merupakan program nasional yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2007. Program tersebut bertujuan untuk mengatasi dan mengurangi jumlah permukiman kumuh di Indonesia. Program ini dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bekerja sama dengan pemerintah daerah. Di Kota Bekasi, program Kotaku telah dilaksanakan sejak tahun 2008 dan berhasil mengurangi jumlah permukiman kumuh di Kota Bekasi. Beberapa program yang telah dilaksanakan dalam program Kotaku di Kota Bekasi adalah yang pertama Rehabilitasi dan relokasi permukiman kumuh, program ini bertujuan untuk merehabilitasi permukiman kumuh yang sudah ada dan merelokasi warga ke tempat yang lebih layak huni.

Program kotaku di Kota Bekasi ini khususnya di Kelurahan Sumur Batu sudah memiliki permasalahan kumuh sejak lama namun dalam penanganannya pemerintah daerah Kota Bekasi melakukan pembenahannya secara bertahap hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan pendanaan APBD kota Bekasi mengakibatkan anggaran yang dialokasikan untuk penanganan permukiman kumuh terbatas sehingga dalam penganggaran menganut sistem prioritas. Terdapat 3 program penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Sumur Batu dan kelurahan Ciketing Udik yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi diantaranya program KOTAKU dari pemerintah pusat yang dilakukan sejak tahun

2018 secara bertahap dan tahun 2020 kembali mendapatkan program KOTAKU. Keberadaan TPA selain berdampak positif juga sebagai salah satu yang memicu permasalahan permukiman kumuh di Kelurahan Sumur Batu faktor lainnya yakni terdapat 7 indikator permukiman kumuh yang ada di Kelurahan Sumur Batu diantaranya permasalahan ketidak teraturan bangunan, kualitas permukaan jalan yang masih kurang, kualitas konstruksi drainase yang kurang, sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis, persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis, dan sarana dan prasarana proteksi kebakaran (Dokumen Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, 2022).

Tabel 1.1
Data Permukiman Kelurahan Sumurbatu

No	RW	Jumlah RT	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah KK	Kategori Kumuh	Keterangan
1	RW 01	8 RT	12 Ha	520 KK	Kumuh Sedang	Drainase kurang baik
2	RW 02	7 RT	10 Ha	480 KK	Kumuh Berat	Dekat TPA, sanitasi kurang
3	RW 03	6 RT	9 Ha	430 KK	Kumuh Sedang	Jalan lingkungan rusak
4	RW 04	9 RT	14 Ha	610 KK	Kumuh Berat	Kepadatan tinggi
5	RW 05	5 RT	8 Ha	350 KK	Kumuh Ringan	Air bersih terbatas
6	RW 06	6 RT	11 Ha	470 KK	Kumuh Sedang	Pengelolaan sampah belum optimal

Berdasarkan tabel yang telah disajikan, kondisi permukiman kumuh di Kelurahan Sumurbatu, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi menunjukkan adanya variasi tingkat kekumuhan di setiap RW, mulai dari kategori ringan, sedang, hingga berat.

RW 03 tercatat sebagai wilayah dengan tingkat kekumuhan paling tinggi dengan luas 6,5 hektare dan jumlah 320 kepala keluarga. Permasalahan yang dihadapi antara lain banyaknya rumah tidak layak huni, fasilitas sanitasi yang kurang memadai, serta keterbatasan akses air bersih. Oleh sebab itu, upaya penanganan lebih difokuskan pada perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) serta pembangunan sarana MCK guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat. RW 01 dan RW 04 termasuk dalam kategori kumuh sedang. Permasalahan yang dominan di kedua wilayah tersebut adalah sistem drainase yang kurang berfungsi dengan baik serta kondisi jalan lingkungan yang rusak.

Penanganan dilakukan melalui perbaikan dan normalisasi saluran drainase serta peningkatan kualitas jalan agar lingkungan menjadi lebih tertata dan tidak mudah tergenang. Sementara itu, RW 02 dan RW 05 tergolong kumuh ringan. Permasalahan yang ditemukan meliputi pengelolaan sampah yang belum optimal serta kondisi jalan yang sempit dan kurang layak. Upaya yang dilakukan antara lain penyediaan fasilitas tempat pembuangan sampah dan peningkatan jalan lingkungan disertai sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan.

Secara umum, permasalahan permukiman kumuh di wilayah tersebut berkaitan erat dengan keterbatasan infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, sanitasi, dan pengelolaan sampah. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah daerah dan masyarakat melalui program penataan kawasan agar tercipta lingkungan permukiman yang lebih layak, sehat, dan nyaman untuk dihuni.

Berdasarkan paparan secara normatif terkait strategi dinas perumahan kawasan permukiman dan pertanahan, dalam program kota tanpa kumuh (Kotaku) di Kelurahan Sumurbatu Kecamatan BantarGebang Kota Bekasi, program kota tanpa kumuh, terutama di kota masih belum tercapai karena meningkatkan akses terhadap

infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung perwujudan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Dalam tujuan umum tersebut terkandung dua maksud.

Strategi yang dilakukan Dinas perumahan kawasan permukiman dan pertanahan dalam program kota tanpa kumuh (KOTAKU) yaitu melakukan identifikasi kawasan kumuh melalui survei langsung ke tingkat kelurahan, RT, dan RW. Kawasan diklasifikasikan ke dalam kategori kumuh ringan, sedang, atau berat. Secara keseluruhan, Strategi Disperkimtan Kota Bekasi dalam Program KOTAKU di Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi mencakup identifikasi berbasis indikator, perencanaan terintegrasi, intervensi fisik kawasan, kolaborasi multipihak, pemberdayaan masyarakat, serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Strategi tersebut diarahkan untuk menurunkan luas kawasan kumuh secara bertahap dan meningkatkan kualitas permukiman masyarakat.

Proses pelaksanaan strategi tersebut menemui hambatan-hambatan yang dialami Dinas perumahan kawasan permukiman dan pertanahan dalam program kota tanpa kumuh (KOTAKU) Di Kelurahan Sumurbatu Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi yaitu adanya keterbatasan anggaran dan pembiayaan serta partisipasi dan kesadaran masyarakat yang masih rendah, hal ini sering menjadi hambatan besar sehingga infrastruktur dan pemeliharaan tidak lanjut dan program sulit terlaksana optimal.

Adapun upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan program ini dengan meningkatkan kegiatan sosialisasi agar masyarakat lebih memahami tujuan dan manfaat program, sehingga partisipasi warga dapat meningkat. Selain itu, pemerintah mendorong keterlibatan aktif masyarakat melalui pendekatan berbasis komunitas seperti peran BKM dan KSM dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan hasil pembangunan. Selain itu, diterapkan pendekatan terpadu lintas sektor yang mencakup perbaikan infrastruktur, sanitasi, dan pengelolaan lingkungan. Pemerintah juga memberikan pendampingan

teknis dan administratif kepada masyarakat serta memastikan adanya pemeliharaan pascapembangunan agar kawasan yang telah ditata tidak kembali menjadi permukiman kumuh.

Dengan demikian, dari penelitian ini terlihat bahwa Strategi Disperkimtan Kota Bekasi dalam Program (KOTAKU) di Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi ini sudah baik, namun memang belum cukup efektif untuk mengurangi jumlah daerah yang kumuh di Kelurahan Sumurbatu, hal ini terlihat dari jumlah permukiman kumuh di Kelurahan Sumurbatu Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Strategi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di kelurahan Sumurbatu Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi ?
2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan Strategi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kelurahan Sumurbatu Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi
3. Upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Strategi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kelurahan Sumurbatu Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Pada dasarnya setiap penelitian memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai dari penelitian tersebut. Dengan tujuan itu, penulis melaksanakan penelitian yang ingin dicapainya. maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui Strategi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kelurahan Sumurbatu Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi.

2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan Strategi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kelurahan Sumurbatu Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Strategi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kelurahan Sumurbatu Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi.

1.4 Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian berisi tentang manfaat penelitian. Signifikansi penelitian terbagi menjadi dua yaitu, signifikansi akademik dan signifikansi praktis. Antara lain:

1.4.1 Signifikansi Akademik

Signifikansi akademik dimaksudkan untuk mencari data tersedia yang pernah ditulis penerbit sebelumnya, dimana ada hubungannya dengan masalah yang akan dikaji dalam penulisan proposal skripsi ini. Dari hasil penelusuran peneliti lakukan selama observasi serta sejumlah data-data yang didapat dan dikumpulkan, Peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan terkait “Strategi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kota Bekasi” diharapkan penelitian ini dapat berjalan dengan lancar. Adapun studi terdahulu yang merujuk pada penelitian ini dan menjadi referensi penelitian tersebut adalah:

Pertama Strategi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dalam Penanganan Permukiman Kumuh Di Kecamatan Singkil Kota Manado (Studi kasus di Kelurahan Kombos Timur). Disusun oleh Gabriel Dave Ponto, Sofia E. Pangemanan dan Ventje Kasenda. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui Strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dalam Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Kombos Timur dengan menggunakan konsep Fred R. David yang mengungkapkan ada 3 tahapan dalam penentuan strategi yakni, perumusan strategi, implementasi strategi, evaluasi strategi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini

menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam menangani permukiman kumuh di Kombos Timur adalah Program Revitalisasi. Revitalisasi adalah peningkatan vitalitas melalui peningkatan kualitas lingkungan yang bertujuan untuk memperbaiki dan mendorong ekonomi kawasan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada. Kegiatan-kegiatan dalam Program Revitalisasi yakni peningkatan Rumah Tidak Layak Huni, Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah, Penyediaan Sumber Air Minum dan Pengadaan Sistem Distribusinya, Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, Pembangunan dan Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan, Pembangunan dan peningkatan Jalan Lingkungan, Peningkatan Sarana Prasarana Untuk Penanggulangan Bencana, Penghijauan Lingkungan, Pengadaan Tempat Olahraga. Namun berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan bahwa kegiatan Revitalisasi di kawasan Lingkungan III sudah tidak terawat lagi.

Kedua Kajian Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Berbasis Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Di Kota Kuala Kapuas. Disusun oleh Harin Tiawon, Titiani Widati dan Amiany. Penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan strategi penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan berbasis program KOTAKU di Kota Kuala Kapuas untuk meningkatkan kualitas permukiman kumuh dan pencegahan timbulnya kumuh baru. Program KOTAKU di Kelurahan Selat Hilir sebagai gambaran dari dua wilayah pelaksanaan NUSP. Pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, untuk menggambarkan hasil kegiatan KOTAKU sebagai program yang bergulir untuk mencapai efektivitas dalam perencanaan program KOTAKU sebagai kelanjutan proses pengentasan kawasan kumuh dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan pemerintah daerah sebagai nahkoda sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan. Strategi penanganan permukiman kumuh ini merupakan bagian dari antisipasi dampak perkotaan dari peningkatan fungsi kawasan menjadi pusat pertumbuhan dan guna merencanakan ruang kawasan permukiman yang lebih manusiawi kedepannya. Perumahan dan

permukiman yang kurang terpadu, kurang terarah dan terencana, serta kurang memperhatikan kelengkapan prasarana dan sarana dasar seperti air bersih, sanitasi, sistem pengelolaan sampah, dan saluran pembuangan air hujan, akan cenderung mengalami degradasi kualitas lingkungan atau yang kemudian diterminologikan sebagai “Kawasan Kumuh.

Ketiga Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Permukiman Dalam Penanganan Permukiman Kumuh Di Jawa Timur. Disusun oleh Niken Dyah Nawang Wulan dan Andre Prasetyo Widodo. Penelitian ini bertujuan akan membahas bagaimana strategi pembangunan dan pengembangan infrastruktur permukiman oleh pemerintah daerah dalam penanganan permukiman kumuh di Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara deskriptif analisis melalui data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil dari studi kepustakaan merupakan komparatif program pemerintah dari dua wilayah yaitu Kabupaten Sidoarjo dan Kota Malang. Berdasarkan hasil studi komparatif dari kedua wilayah tersebut dapat diketahui pelaksanaan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dan capaian yang telah diperoleh kedua wilayah tersebut.

Keempat Strategi Pemerintah Daerah Dalam Upaya Penguatan Ecological Citizen Pada Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kabupaten Sukoharjo. Disusun oleh Dedy Ari Nugroho dan Suharno. Penelitian ini bertujuan utama sebagai hasil refleksi dari rumusan masalah di atas. Pertama, karya ilmiah ini mengkaji strategi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam upaya menguatkan ecological citizenship masyarakat Kabupaten Sukoharjo dalam Program KOTAKU. Kedua, mengidentifikasi bentuk partisipasi masyarakat Kabupaten Sukoharjo dalam Program KOTAKU, sebagai bentuk kontribusi di bidang ekologi (ecological citizenship). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil Program pembangunan ekologis yang dijadikan obyek penelitian adalah Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Karya ilmiah penelitian ini dibuat sebagai refleksi atas persoalan kewarganegaraan, khususnya tentang persoalan apatisisme masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan di bidang pengendalian lingkungan. Sebagai negara demokrasi, Indonesia

membuktikan dengan sendirinya bahwa negara telah memperhatikan partisipasi rakyatnya.

Kelima Strategi Penanganan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kelurahan Cibangkong Berdasarkan Konsep Livable Settlement. Disusun oleh Tasya Salsha Safarina dan Verry Damayanti. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi penanganan permukiman kumuh yang tepat di Kelurahan Cibangkong berdasarkan konsep livable settlement. Metode pendekatan yang digunakan adalah mixed method untuk mengidentifikasi kondisi permukiman kumuh. Hasil dari penelitian ini yaitu strategi penanganan permukiman kumuh diantaranya Peningkatan kualitas dan pemeliharaan infrastruktur dasar, memberikan edukasi mengenai finansial, pemberian modal usaha, dan keterampilan untuk membuka usaha/jasa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjalin kolaborasi antara pemerintah, akademisi, atau ahli untuk menyusun penanganan yang tepat.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul penelitian	Hasil penelitian	Persamaan dan perbedaan
1	2	3	4	5

1	Gabriel Dave Ponto, Sofia E. Pangemana n dan Ventje Kasenda. (2022)	Strategi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dalam Penanganan Permukiman	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam menangani permukiman kumuh di Kombos Timur adalah Program Revitalisasi.	Persamaan : Sama-sama membahas strategi Dinas perumahan dan kawasan permukiman dalam penanganan permukiman
1	2	3	4	5

2	Harin Tiawon,Titi ani Widati dan Amiany. (2018)	Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Berbasis Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Di Kota Kuala Kapas	Perumahan dan permukiman yang kurang terpadu, kurang terarah dan terencana, serta kurang memperhatikan kelengkapan prasarana dan sarana dasar seperti air bersih, sanitasi, sistem pengelolaan sampah, dan saluran pembuangan air hujan, akan cenderung mengalami degradasi kualitas lingkungan atau yang kemudian diterminologikan sebagai kawasan permukiman kumuh	Persamaan : Sama- sama membahas strategi Dinas perumahan dan kawasan permukiman dalam penanganan permukiman kumuh. Dengan subjek dan metode penelitian yang digunakan. Perbedaan : Lokus penelitian dan teori penelitian.
1	2	3	4	5

3	Niken Dyah Nawang Wulan dan Andre. (2020)	Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Permukiman Dalam Penanganan Permukiman Kumuh di Jawa Timur.	Hasil dari studi kepustakaan merupakan komparatif program pemerintah dari dua wilayah yaitu Kabupaten Sidoarjo dan Kota Malang. Berdasarkan hasil studi komparatif dari kedua wilayah tersebut dapat diketahui pelaksanaan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dan capaian yang telah diperoleh kedua wilayah tersebut	Persamaan : Sama-sama membahas strategi pemerintah daerah pada program kota tanpa kumuh. Dengan subjek dan metode penelitian yang digunakan Perbedaan : lokus penelitian dan teori penelitian.
4	Dedy Ari Nugroho dan Suharno (2017)	Strategi Pemerintah Daerah Dalam Upaya Penguatan Ecological Citizen Pada Program Kota Tanpa Kumuh	Berdasarkan hasil studi komparatif dari kedua wilayah tersebut dapat diketahui pelaksanaan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dan capaian kedua wilayah.	Persamaan : Sama-sama membahas Strategi ,dengan subjek dan metode penelitian yang sama. Perbedaan : Lokus penelitian dan teori penelitian.
1	2	3	4	5

5	Tasya Salsha Safarina dan Verry Damayanti. (2023)	Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Cibangkong Berdasarkan Konsep Livable Settlement.	Hasil dari penelitian ini yaitu strategi penanganan permukiman kumuh diantaranya Peningkatan kualitas dan pemeriharaan infrastruktur dasar, memberikan edukasi mengenai finansial, pemberian modal usaha, dan keterampilan untuk membuka usaha/jasa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjalin kolaborasi antara pemerintah, akademisi, atau ahli untuk menyusun penanganan yang tepat.	Persamaan : Sama-sama membahas strategi Perbedaan : Lokus penelitian ,teori penelitian serta metode penelitian
---	--	--	--	---

1.4.2 Sistematika Penulisan

Dalam sistem penulisan proposal skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab, tiap-tiap bab terdiri atas sub bab dengan maksud untuk mempermudah dan memberikan

gambaran yang menyeluruh dalam mengetahui hal-hal yang dibahas dalam proposal skripsi ini menjadi tersusun secara rapi, dan terarah.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang permasalahan yang menggambarkan ruang lingkup serta kedudukan masalah yang akan diteliti dalam bentuk uraian. Kemudian pada bab ini membahas rumusan masalah dijadikan fokus atau inti dari penelitian yang akan dilakukan untuk mencapai hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian, dimana tujuannya ialah akan menghasilkan sasaran yang ingin dicapai terhadap masalah yang telah dirumuskan. Kegunaan penelitian yaitu menjelaskan tentang signifikan penelitian yang terbagi menjadi dua yaitu signifikansi akademik dan signifikansi praktis, dimana berisi tentang manfaat teoritis dan praktis yang berguna bagi peneliti, pembaca, dan instansi yang terkait. Dalam bagian akhir bab ini adalah sistematika penelitian untuk memudahkan pembaca untuk mengetahui apa saja isi dari penelitian ini secara menyeluruh.

BAB II KERANGKA TEORI

Bab ini berisi tentang teori yang digunakan dalam mendukung penelitian dimana tujuannya untuk menjawab problematika dalam penelitian ini. Adapun bab ini berisi definisi strategi, manajemen strategi, konsep permukiman kumuh, aspek dan kriteria permukiman kumuh, konsep penanganan permukiman kumuh. Selain itu, berisi konsep teori strategi pemerintahan serta kerangka berpikir yang menggambarkan bagaimana alur dari penelitian itu dikaji dengan teori yang sesuai dengan penelitian, sehingga dapat membuat asumsi dalam penelitian sementara.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai paradigma penelitian, metode penelitian kualitatif, desain penelitian, sumber dan teknik perolehan data, teknik analisis data, goodness dan quality criteria penelitian, tempat dan waktu penelitian, jadwal penelitian, dan keterbatasan penelitian.

BAGIAN AKHIR

Pada bagian akhir ini berisi mengenai Daftar Pustaka dan Lampiran: Instrumen penelitian (pedoman wawancara) & hasil laporan observasi.